

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Analisis terhadap 2 variabel telah membawa peneliti pada kesimpulan bahwa pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik-paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe disebabkan oleh 2 (dua) hal sebagai berikut:

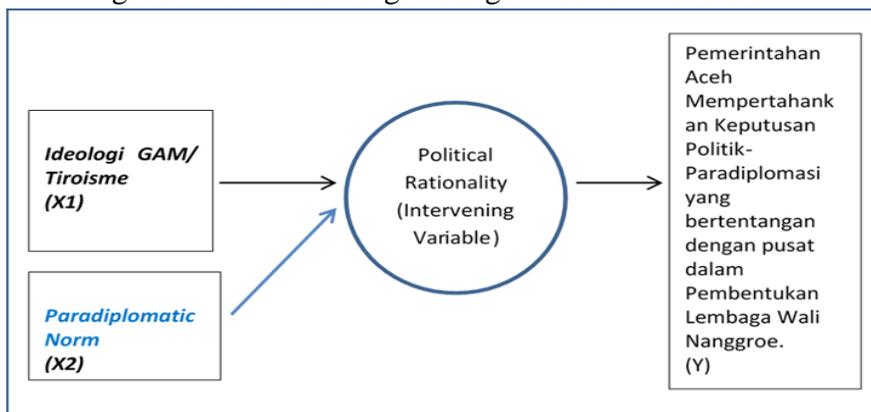
1. Ideologi GAM sebagai preferensi politik para pemimpin Pemerintahan Aceh baik Eksekutif maupun Parlemen, berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politik-paradiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat sebagai cara untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM. Rasionalitas politik para pemimpin Aceh dalam membuat keputusan politik sangat dipengaruhi oleh preferensi ideologi politik GAM yakni Tiroisme yang telah tertanam dalam jiwa mereka selama bertahun-tahun sebelumnya.
2. Norma Paradiplomasi (*Paradiplomatic Norm*) berpengaruh positif terhadap keputusan mempertahankan politik-paradiplomasi pemerintahan Aceh. Paradiplomasi sebagai norma internasional sangat berperan dalam pembentukan kepentingan ‘nasional’ (pemerintahan) Aceh. Rasionalitas politik para pemimpin pemerintahan Aceh dengan latar belakang sejarah dan pengalaman para tokoh-tokoh GAM di luar negeri, menemukan kombinasi ideal antara semangat ‘Jihad’ melalui ‘diplomasi’ dengan ‘norma paradiplomasi’ yang biasa (*custom*) dilakukan oleh sebuah

‘substate’/pemerintah regional atau negara bagian. Kewenangan urusan luar negeri itu harus diletakkan di tangan seorang Wali Nanggroe, karena posisinya yang lebih tinggi dari Gubernur dan parlemen Aceh. Dari sini dapat dimengerti bahwa, dalam konteks pasca perdamaian, (para)-diplomasi yang dilakukan oleh para pimpinan GAM adalah suatu bagian dari ‘Jihad’, dan bukan sekedar usaha untuk mempengaruhi bangsa lainnya (influence).

Pengembangan teoritik yang dihasilkan dari riset ini adalah digunakannya variabel baru Norma Paradiplomasi untuk menganalisis sebab terjadinya konflik politik-paradiplomasi antara pemerintah lokal (substate) dengan pusat. Pernyataan teoritik yang dibangun dalam disertasi ini adalah, bahwa konflik politik-Paradiplomasi antara pemerintah lokal (substate) dengan pemerintah pusat akan terjadi, jika ideologi politik gerakan (ideologi GAM) dan norma internasional paradiplomasi menjadi preferensi politik di dalam tubuh pemerintahan regional pasca perdamaian.

Secara skematik pengembangan teoritik ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Figure 6.1 : Skema Pengembangan Teoritik Penelitian



Kebaruan penelitian (*Novelty*) dalam riset ini adalah tergambarkannya rasionalitas politik khas pada Pemerintahan Aceh yang dipengaruhi oleh preferensi ideologi politik GAM tahun 2013

yang berbeda dengan keumuman teoritik rasionalitas politik suatu pemerintahan. Secara teoritis, keumuman rasionalitas politik dalam suatu pemerintahan akan memiliki urutan dari yang paling prioritas adalah *survival, security, welfare, prestige dan influence* (Warsito, 2017). Namun, dalam Pemerintahan Aceh, terjadi perubahan dan pergantian urutan rasionalitas politik tersebut, yakni *prestige, security, welfare, justice dan survival*.

Secara lengkap rasionalitas politik khas Pemerintahan Aceh dengan preferensi ideologi politik GAM dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 6.1 : Perbandingan Rasionalitas Politik Secara Umum dengan Rasionalitas Politik Khas Pemerintahan Aceh

No.	Keumuman Teoritik Rasionalitas Politik Suatu Pemerintahan	Rasionalitas Politik Khas Pemerintahan Aceh dalam Mempertahankan Politik Paradiplomasi dalam LWN
1	Survival	Marwah Bangsa Aceh a. Wali Nanggroe b. Lambang, Bendera (Prestige)
2	Security	Jihad a. Perang sabil b. (Para)diplomasi (Security)
3	Welfare	Kesejahteraan (Welfare)
4	Prestige	Keadilan a. Keadilan umum b. Pengadilan penjahat kemanusiaan (Justice)
5	Influence	Aceh Merdeka a. Dari Belanda b. Dari Jawa-indonesia (Survival)

6.2 Rekomendasi

Dari riset disertasi ini, peneliti merekomendasikan 6 (enam) hal untuk dapat dilakukan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pemerintahan Aceh dan para pemimpin politik di Aceh harus menjaga perdamaian dengan retorika politik yang kondusif agar tidak menimbulkan ketegangan baru dengan Jakarta sehingga komunikasi politik dapat terus berjalan secara optimal.
2. Bangsa Aceh dan partai-partai local Aceh harus membangun kesadaran dan komitmen tentang pentingnya penguatan partai-partai local Aceh agar dapat menjadikan DPRA sebagai DPR-nya Bangsa Aceh melalui partai yang asli tumbuh di tanah Aceh. Penguatan partai-partai local dan DPRA ini akan menguatkan kemandirian politik ke-Aceh-an dalam mengatur Nanggroe Aceh.
3. Partai-partai local Aceh harus mendisiplinkan anggotanya secara kuat agar tidak terjebak dalam jeratan perilaku yang melanggar hukum, agar kepercayaan rakyat terhadap partai local dapat dipelihara dan ditingkatkan. Turunnya kepercayaan rakyat Aceh terhadap partai-partai local merupakan ancaman serius bagi perjuangan kemandirian Aceh yang bermartabat.
4. Bangsa Aceh harus menghentikan secara total perjuangan bersenjata atau peperangan karena justru akan menjauhkan diri dari tercapainya cita-cita Aceh mulia. Perjuangan melalui mekanisme demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia adalah jalan yang paling tepat dan efektif bagi Bangsa Aceh untuk mewujudkan Aceh yang damai, mandiri, maju, makmur, dan bermartabat mulia.
5. Pemerintah pusat direkomendasikan untuk membentuk kementerian khusus (menteri muda) urusan pengelolaan daerah khusus/istimewa di Indonesia agar dapat melakukan respon cepat terhadap isu-isu yang muncul dari daerah. Selama ini semua urusan pemerintahan daerah berada di tangan

Kementerian Dalam Negeri yang sering dirasakan ‘*slow response*’ terhadap permasalahan yang ada di daerah-daerah berkarakter khusus ini, yakni Aceh, Papua dan D.I. Yogyakarta, serta DKI Jakarta.

6. Perlunya riset yang meneliti tentang keberlanjutan ideologi GAM dalam pemerintahan Aceh setelah Gubernur Aceh dijabat oleh Plt Gubernur Nova Iriansyah dari partai nasional (Partai Demokrat) atau non-GAM, serta konfigurasi DPRA hasil pemilu 2019, karena akan bermanfaat untuk memperkirakan arah politik Pemerintahan Aceh di masa yang akan datang sehingga dapat direspon secara tepat oleh para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah.